

NEOLIBERALISME DAN EKONOMI KERAKYATAN

Abstrak

Dari artikel ini diharapkan diperoleh informasi yang seimbang mengenai komparasi antara pemikiran neolib dan ekonomi kerakyatan. Selain itu diharapkan juga dapat merumuskan konsep ekonomi seperti apa yang dapat mengantarkan Indonesia pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Neoliberalisme lahir dari pengembangan faham ekonomi liberal. Liberalisme itu sendiri merupakan doktrin yang memperjuangkan fundamentalisme pasar, yaitu pandangan yang menekankan bahwa mekanisme pasar akan berjalan dengan baik apabila bebas dari intervensi pemerintah. Konsep ini tidak berjalan dengan baik sehingga dikoreksi oleh Keynes dengan membolehkan campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran agar kondisi full employment tercapai. Konsep yang ditawarkan oleh Keynes ini kemudian dikenal dengan mazhab neoklasik. Dalam perkembangannya, neoklasik mengalami penyempurnaan menjadi neoliberalisme seiring dikeluarkannya Washington Consensus yang berisi komitmen untuk mengarahkan kebijakan pada liberalisasi pasar, kebijakan fiskal ketat sebagai bentuk pengurangan intervensi pemerintah, dan privatisasi. Kebijakan neoliberalisme bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan tingkat inflasi yang terkendali.

Sebaliknya, ekonomi kerakyatan berjalan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang digerakkan dengan semangat kemandirian. Indikator kesuksesan dari ekonomi kerakyatan ditunjukkan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran tanpa disertai dengan penambahan beban utang luar negeri.

Kata Kunci: *Ekonomi liberal, neoliberal, ekonomi kerakyatan.*

Pendahuluan

Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *The Wealth of Nations* mencetuskan teori ekonomi yang intinya meniadakan peran pemerintah, namun tetap percaya adanya kekuatan *invisible hand* dalam pasar sehingga efisiensi ekonomi dapat tercapai. Smith berpendapat bahwa kebebasan dalam produksi dan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk membangun ekonomi suatu negara. Kebebasan tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak pada kebebasan berusaha dan bersaing bagi pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya.

Doktrin liberal menempatkan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang tanpa aturan. Siapa yang kuat, dialah yang jadi penguasa pasar. Dampaknya, kemiskinan semakin tumbuh subur dan kesenjangan ekonomi makin melebar. Kelemahan dari teori klasik coba disempurnakan oleh John Maynard Keynes, dengan membolehkan campur tangan pemerintah dalam rangka mencapai kondisi *full employment*. Lalu Milton Friedman, seorang ekonom Amerika Serikat keturunan Yahudi, menyempurnakan apa yang dicetuskan Keynes dengan menambahkan aspek liberalisasi. Teori ini dalam banyak literatur ekonomi disebut sebagai faham neoklasik. Teori ekonomi klasik dan neoklasik inilah yang menjadi dasar berkembangnya faham liberalisme dan neoliberalisme (selanjutnya disingkat dengan istilah neolib). Bersamaan dengan itu dikembangkan juga wacana ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks Indonesia, wacana ekonomi neolib berbenturan dengan ekonomi kerakyatan yang selama ini dicita-citakan para pendiri bangsa. Yang menjadi pertanyaan adalah sistem ekonomi apakah yang saat ini diterapkan di Indonesia? Apakah sistem ekonomi tersebut telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945?

Di bagian awal artikel ini akan membahas secara singkat mengenai perkembangan ekonomi neolib dan ekonomi kerakyatan. Kemudian di bagian akhir akan dibahas tentang analisis kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia apakah berorientasi pasar (pro pasar), atau pro rakyat, atau bahkan perpaduan antara pro pasar dan pro rakyat.

Liberalisme

Merujuk pada ajaran ekonomi klasik, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan sama sekali. Elfisgon dalam bukunya yang berjudul "Menghadapi Globalisasi", sebagaimana dikutip oleh Muhammad Herry, memberikan gambaran yang cukup baik tentang perkembangan pemikiran ekonomi dunia yang mengawali perkembangan neoliberalisme ini.

Liberalisme tumbuh di Eropa sebagai reaksi dari sistem theokrasi-feodal yang menindas rakyat Eropa. Kaum aristokrat dan gereja menguasai seluruh tanah pertanian yang merupakan mata pencarian penting pada masa itu, sedangkan petani hanya sebagai penggarap dengan hasil tidak mencukupi hidup keluarganya. Semua kezaliman tersebut oleh aristokrat dan gereja dilegalisasi melalui penafsiran tunggal gereja terhadap ajaran Bible.

Akibat penindasan tersebut melahirkan gerakan sekulerisme yang berujung pada revolusi di Amerika dan Prancis. Revolusi ini mengubah Eropa yang monarki-feodal ke demokrasi-liberal. Suatu bentuk pemerintahan yang menggantikan tuhan gereja menjadi tuhan akal. Pemerintah menghapus seluruh hak *previlege* gereja dan aristokrat,

kemudian menempatkan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban yang sama. Walaupun persamaan hak itu hanya dalam kertas karena realitanya tetap ada yang mendapatkan hak *previlege* itu, yaitu kaum industriawan kapitalis dan para politisi.

Seiring dengan revolusi Prancis, muncul pemikiran baru tentang ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran mereka adalah apa yang disebut *Leisses-Faire*. Suatu konsep yang menyatakan bahwa perekonomian hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar dan sekaligus menolak intervensi pemerintah dalam interaksi di pasar. Dalam perjalanannya, konsep ini banyak membawa kezaliman tersendiri yang lebih parah dibanding zaman feodalisme.

Konsep persaingan sempurna dan *invisible hand* yang diprediksi akan membuat perekonomian efisien ternyata sulit terwujud. Yang sesungguhnya terjadi adalah prinsip *laissez faire* ini menciptakan kondisi di mana pengusaha besar dengan kekuatan modalnya menyingkirkan pengusaha kecil. Akibatnya jurang antara kaum kapitalis dan kaum miskin semakin besar dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa karena pasar dilarang diintervensi.

Yang paling menderita dalam hal ini adalah kaum buruh atau pekerja. Upah mereka ditentukan murni berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Ditambah lagi dengan munculnya revolusi industri yang mengakibatkan penggunaan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Akibatnya daya tawar buruh semakin rendah, bahkan mereka harus rela menerima upah yang nyaris nol.

Dampaknya pun mulai dirasakan, pada tahun 1930-an perekonomian dunia terjerumus ke dalam *great depression*, sehingga kepercayaan terhadap paham ekonomi liberal merosot secara drastis. Pasar ternyata tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi besar 1930-an tidak hanya ditandai oleh terjadinya kebangkrutan dan pengangguran massal, tetapi bermuara pada terjadinya Perang Dunia II.

Kemudian pertentangan semakin marak ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Uni Soviet dan menunjukkan dirinya sebagai musuh dari kapitalisme. Aliran ekonomi ini mengandalkan peran negara sampai menghapus hak individu. Ajaran Karl Marx dan Freiderich Engels ini yang kemudian disempurnakan oleh Vladimir Ilyich Lenin, dikenal sebagai Marxisme-Leninisme.²

Kondisi ini kemudian memunculkan pemikiran baru tentang ekonomi, yaitu Keynesian, yang berisi konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Keynes menghendaki adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk investasi dan fiskal untuk mencapai *full employment* dalam rangka menaikkan permintaan agregat.³

Neoliberalisme

Sesuai dengan namanya, neolib adalah bentuk baru dari doktrin ekonomi pasar. Sebagai salah satu varian dari kapitalisme, neolib merupakan upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam ekonomi klasik.

Dalam mengatasi kelemahan ekonomi liberal, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rostow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan berupa penguatan peran negara sebagai pembuat peraturan. Gagasan Rostow dan Eucken kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ropke dan Simon. Selanjutnya, Friedrich von Hayek, pemenang Nobel Ekonomi 1974, yang selama ini dipandang sebagai bapak neolib, menawarkan solusi dalam mengatasi kelemahan ekonomi pasar dengan menganjurkan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.⁴

Pengertian neoliberalisme menurut bahasa adalah suatu aliran politik ekonomi muncul setelah Perang Dunia I yang menekankan pada ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha mengurangi campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Sedangkan makna neolib menurut Amien Rais adalah faham yang selalu menjunjung tinggi kebebasan pasar (*market friendly*), dan identik dengan lembaga donor internasional seperti IMF (*International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional*), Bank Dunia dan ADB (*Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia*). Mekanisme pasar dalam ajaran neolib ditopang oleh tiga unsur, yakni pemilik modal, pemilik barang, dan para spekulan.⁵

Inti dari kebijakan ekonomi neolib mencakup: (1). Kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar; (2). Pengakuan terhadap penguasaan faktor-faktor produksi oleh pribadi; dan (3). Pembentukan harga bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang.⁶

Dalam perkembangannya, pada konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods Amerika Serikat (AS) pada 1944, konsep yang ditawarkan oleh para ekonom neolib tersebut tersisih oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes. Konsep negara kesejahteraan menurut Keynes memberikan keleluasaan peran negara meliputi kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes dengan tegas mengatakan bahwa selama masih ada pengangguran campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.⁷

Namun ajaran Keynes tidak bertahan lama. Pada awal 1970-an, menyusul terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden AS dan Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, justru ajaran neolib yang diterapkan secara luas. Di AS ditandai dengan dilakukannya pengurangan

subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedangkan di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal.⁸

Terkait dengan negara-negara sedang berkembang, penerapan neolib terjadi pada akhir 1980-an. Dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi secara luas di negara-negara Amerika Latin. Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan IMF merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai *Washington Consensus*. Pada awalnya *Washington Consensus* ini diperkenalkan oleh John Williamson yang menggagas sepuluh butir kebijakan ekonomi sebagai resep standar yang disepakati oleh Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.⁹ Konsensus Washington tercakup ke dalam 10 butir kebijakan, yang meliputi: (1). Disiplin fiskal; (2). Pengurangan belanja negara; (3). Reformasi perpajakan; (4). Liberalisasi sektor keuangan dengan suku bunga yang ditentukan oleh pasar; (5). Kurs mata uang dengan mempertimbangkan daya saing; (6). Liberalisasi sektor perdagangan; (7). Liberalisasi investasi asing; (8). Privatisasi; (9). Deregulasi, yang mencakup penghapusan berbagai peraturan yang membatasi masuknya pemain baru atau tingkat persaingan; (10). Perlindungan hak cipta, berupa penjaminan hak-hak kepemilikan dan berlaku bagi sektor informal.¹⁰

Sunarsip, seorang ekonom, berpendapat bahwa paket kebijakan Konsensus Washington dapat dibenarkan berdasarkan teori ekonomi. Misalnya dalam konteks fiskal yang merujuk pada pandangan Keynes, fiskal ekspansif diperlukan ketika ekonomi sedang resesi. Sedangkan fiskal ketat diperlukan ketika ekonomi *overheating*.

Liberalisasi juga tidak selamanya berdampak buruk. Dalam beberapa kasus, rakyat justru mendapatkan manfaat dari liberalisasi. Contohnya ketika sektor telekomunikasi belum dibebaskan, rakyat sangat dirugikan karena tarif telepon mahal akibat monopoli Telkom dan Indosat. Setelah dibebaskan dan banyak perusahaan yang masuk ke sektor telekomunikasi, kini tarif telepon menjadi lebih terjangkau.

Privatisasi BUMN juga tidak selamanya berdampak negatif. Di tengah keterbatasan pemerintah untuk menyuntikkan tambahan modal, privatisasi justru dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui peningkatan modal BUMN. Inilah alasan mengapa Konsensus Washington dianggap sebagai kebijakan yang tidak tepat, akibat implementasi yang salah.¹¹

Kesalahan implementasi terjadi pada saat mengatasi krisis ekonomi di Meksiko. Tindakan Meksiko yang menunggak utang luar negeri pada 1982 membuat para kreditor (termasuk IMF, Bank Dunia, dan AS) mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mengacu pada Konsensus Washington. Maka diberlakukanlah kebijakan pertama Konsensus Washington, yaitu pengetatan fiskal dengan dalih mengendalikan defisit fiskal. Namun, di balik alasan itu motivasi utamanya adalah memaksimalkan pengembalian pinjaman kepada kreditor.

Motivasi yang sama juga ada di balik penerapan kebijakan kedua Konsensus Washington yaitu privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktanya, privatisasi justru dilakukan pada BUMN yang sehat. Tujuannya, agar diperoleh *fresh money* yang cepat untuk digunakan untuk melunasi pinjaman kepada para kreditur. Padahal, prinsip privatisasi BUMN dalam konteks korporasi adalah meningkatkan kinerja BUMN.

Untuk lebih memaksimalkan manfaat bagi kreditur, diberlakukanlah kebijakan ketiga yaitu liberalisasi. Tujuannya, agar perusahaan-perusahaan asal negara kreditur bisa menguasai saham-saham BUMN. Berawal dari sinilah timbulnya stigma privatisasi adalah 'asingisasi'. Padahal, privatisasi sesungguhnya tidak identik dengan 'asingisasi'.

Dalam rangka memuluskan agenda neolib tersebut, langkah yang dilakukan mulai dari tekanan politik, pembentukan opini melalui media massa, sampai pada rekayasa ekonomi. Semuanya diawali dengan perangkap utang luar negeri. Melalui lembaga IMF, agen neoliberal mendiktekan keinginannya kepada negara debitur melalui *LoI (Letter of Intent)*¹². Mengutip pendapat Hery,¹³ pada umumnya *LoI* berisi tiga kebijakan sebagai berikut:

Pertama, melalui penerapan perdagangan bebas. Kaum neoliberal mengembangkan konsep perdagangan bebas yang bukan lagi bertaraf nasional namun taraf global. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberal di antaranya bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-*dumping*. Untuk mewujudkan langkah pertama ini maka dibentuklah forum AFTA (*ASEAN Free Trade Area/Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN*), APEC (*Asia Pacific Economy Cooperation/Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade/Perjanjian Umum Tentang Tarif-Tarif dan Perdagangan*). Menurut argumen kaum neoliberal, pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Kebijakan yang bersifat nasionalis, protektif, dan populis akan membuat kemunduran ekonomi negara dunia ketiga. Di lain pihak, pasar bebas akan membuat ekonomi berjalan efisien, kompetitif dan bertaraf dunia. Namun ada konsekuensi dari kebijakan ekonomi neoliberal yang disembunyikan, yaitu dalam persaingan global perusahaan multinasional bebas juga mengalahkan industri kecil yang semula dilindungi pemerintah.

Kedua, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial. Contoh konkretnya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), swastanisasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, dan swastanisasi rumah sakit. Semuanya dilakukan dengan alasan ketidaktersediaan anggaran.

Ketiga, mengurangi peran negara melalui privatisasi BUMN. Umumnya kekayaan negara dunia ketiga terkonsentrasi pada BUMN. Dengan alasan privatisasi, perusahaan multinasional asing boleh menguasai saham BUMN. Dampak negatifnya, ketika salah satu perusahaan multinasional di negara lain mengalami masalah keuangan, mereka tinggal menjual aset di negara lain lagi untuk membantu keuangan perusahaan yang rugi tersebut. Pada akhirnya yang terjadi adalah PHK massal yang dialami jutaan pekerja pada perusahaan bekas BUMN ini.

Privatisasi dan globalisasi di Inggris membawa dampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, dari 10 persen menjadi 25 persen. Privatisasi dan globalisasi yang semula diandalkan sebagai jalan untuk memperoleh efisiensi ekonomi berubah menjadi masalah sosial yang menimbulkan pengangguran akibat *lay off* yang menyertainya.¹⁴

Di Amerika Serikat, antara rentang waktu 1977 dan 1988, kelompok masyarakat menengah ke atas mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 50 persen. Sementara kelompok menengah ke bawah justru mengalami penurunan rata-rata 15 persen. Ini berarti kesenjangan makin melebar.¹⁵ Jelas terlihat bahwa selama doktrin dan kebijakan neolib seperti privatisasi dan globalisasi diterapkan telah terjadi proses pemiskinan dan melebarnya kesenjangan kemakmuran masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi di Inggris maupun AS, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Kekayaan makin menumpuk pada penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha setempat yang menjadi kaki tangan IMF dan Bank Dunia.

Mengutip pendapat Aswar Aly yang bersumber dari buku karya Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*¹⁶, globalisasi ternyata tidak membawa penghidupan yang lebih baik bagi negara miskin yang ingin meraih kesejahteraan sebagaimana dijanjikan oleh doktrin neolib. Dalam buku tersebut, Stiglitz mengemukakan enam alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Pertama, negara-negara Barat telah mendorong negara-negara miskin untuk membuka pasarnya bagi barang-barang mereka. Sementara negara Barat sendiri tetap menjalankan hambatan terhadap impor barang-barang negara miskin (*unequal free trade*). Padahal negara-negara miskin amat memerlukan pendapatan dari ekspornya untuk membayar utang.

Alasan kedua, bank-bank di negara barat menikmati keuntungan dari pengendoran kendali pasar modal di Amerika Latin dan Asia, tetapi wilayah itu menderita kerugian besar karena masuk dan keluarnya valuta asing secara bebas yang bertujuan spekulatif. Aksi spekulasi ini telah melumpuhkan mata uang sekaligus melemahkan sistem perbankan negara di wilayah tersebut. Sebagai contoh adalah terjadinya krisis moneter yang menimpa Asia Tenggara di pertengahan 1997.

Ketiga, *free investment* dari perusahaan-perusahaan barat di negara miskin tidak cukup untuk membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran. Ditambah lagi dengan tidak adanya transfer teknologi dan keuntungan yang dapat dikategorikan sebagai nilai tambah perekonomian

negara miskin, sementara sumber daya alam negara-negara miskin mengalami depresi, kerusakan lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali, dan akhirnya keuntungan yang diraih investor berlipat ganda dibandingkan investasi yang dilakukan.

Keempat, sebagai imbalan terhadap bantuannya negara-negara barat selaku kreditur seringkali memaksakan imbalan yang bersifat mengabaikan kedaulatan nasional dari negara-negara miskin yang diberikan pinjaman.

Kelima, cita-cita globalisasi untuk menciptakan integrasi yang lebih dekat antara negara dan umat manusia di dunia dalam bentuk menurunnya ongkos transportasi dan komunikasi, menghilangkan hambatan terhadap arus barang, jasa, modal, pengetahuan (*knowledge*) dan manusia antar negara, ternyata hanya berupa janji yang tidak terwujud.

Keenam, stabilisasi ekonomi dunia yang dibebankan kepada IMF ternyata gagal diwujudkan. IMF cenderung melakukan pengetatan moneter yang selalu berdampak kontraksi terhadap ekonomi negara yang dibantunya antara lain dengan pengurangan defisit anggaran, menaikkan tarif pajak, dan meningkatkan suku bunga. Padahal Keynes menyampaikan bahwa untuk mengatasi kemerosotan ekonomi diperlukan penciptaan *aggregat demand* yang memadai untuk mencapai *full employment* dan stabilitas ekonomi. Apabila dengan kebijakan moneter ternyata tidak mencukupi, misalnya penurunan suku bunga dan penambahan likuiditas perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan rangsangan berupa kebijakan fiskal yang menurunkan tarif pajak atau meningkatkan belanja negara terutama untuk membangun infrastruktur perekonomian, ataupun merangsang sektor riil dan perdagangan, sekalipun anggaran defisit.

Aswar Aly mengemukakan bahwa untuk memahami semua yang terjadi baik di tataran nasional maupun internasional, perlu disampaikan informasi sebagaimana yang ditulis oleh Henry Ford Sr dalam sebuah buku berjudul *International Jew*. Dalam buku tersebut Henry mengutip beberapa poin dari salinan *The Protocols of The Learned Elders of Zion* (Protokol Zion). Di antaranya adalah protokol tujuh menekankan pentingnya menguasai opini publik melalui pers. Protokol delapan menekankan pentingnya menguasai pemerintahan dengan para ekonom dan bankir, serta menjadikan ilmu ekonomi sebagai buku instruksi utama dari kaum Yahudi terhadap pemerintah. Protokol sembilan menekankan pentingnya untuk menjadi pembuat undang-undang, serta mempengaruhi pengadilan dan yurisprudensi.¹⁷

Kemudian protokol sepuluh berbunyi, "Manakala kita akan memperkenalkan racun liberalisme kepada pemerintah, maka keseluruhan kompleksitas politik akan berubah". Agaknya inilah petunjuk untuk melakukan liberalisasi. Selanjutnya protokol 20 berbunyi, "Kita menciptakan krisis ekonomi bagi kaum non-Yahudi dengan jalan menarik uang dari peredaran. Modal masyarakat akan stagnasi, uang ditarik dari berbagai pemerintah, dan pada gilirannya mereka akan kembali memohon

utang tambahan pada para pemilik modal. Utang semacam itu tentu akan memermalukan pemerintah-pemerintah sehubungan dengan beban bunga, dan menjadikan mereka tunduk pada para kapitalis".¹⁸ Bila mencermati informasi yang disampaikan Henry tersebut, ternyata apa yang terjadi pada saat ini mengenai neoliberalisme tidak lain merupakan agenda tersembunyi dari kaum minoritas Yahudi.

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, seperti yang dikutip oleh Rizki Hakim, yaitu kegiatan ekonomi yang bergerak dalam semangat untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang digerakkan dalam semangat kemandirian.¹⁹ Ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai perekonomian yang mengedepankan kedaulatan rakyat serta menjadikan rakyat sebagai titik pusat perubahan, motor penggerak aktivitas perekonomian dan inti dari perubahan ekonomi.²⁰

Bila para ekonom neolib tetap konsisten menggunakan target pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesuksesan pemerintah, sebaliknya para ekonom kerakyatan sangat menolak pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan. Dalam mazhab ekonomi kerakyatan, indikator kesuksesan sebuah pemerintahan ditunjukkan melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan pengangguran.²¹

Kritik yang ditujukan pada faham ekonomi kerakyatan lebih karena faham ini tidak memiliki basis akademis atau keilmuan. Pihak yang kontra terhadap ekonomi kerakyatan mulai menyebarkan opini bila kebijakan ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan menyebabkan para pemilik modal asing lari dari Indonesia.

Dalam menghadapi kritik terhadap ekonomi kerakyatan tersebut, Imam Sugema memiliki beberapa argumen yang menarik.²² Pertama, sebetulnya yang akan menikmati berkembangnya perekonomian rakyat adalah para pengusaha dan pemerintah itu sendiri. Bila perekonomian rakyat berkembang dengan baik, kelompok yang tadinya miskin menjadi tidak miskin dan memiliki daya beli yang lebih baik. Yang tadinya tidak mampu membeli pakaian yang bagus, kelak menjadi bisa membeli baju bagus. Barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan motor yang tadinya tidak terbeli menjadi terbeli. Semua itu jelas diproduksi oleh perusahaan besar. Pemerintah juga diuntungkan karena semula ada kelompok yang harus disubsidi terus-menerus, kelak bisa membayar pajak. Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah *win-win solution*, tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Kedua, perusahaan besar bisa berkembang secara bersamaan dengan perusahaan mikro dan kecil. Contohnya, seperti pola perkebunan inti rakyat (PIR) atau tambak inti rakyat (TIR). Bahkan ternyata pemakai tepung terigu terbesar yang diproduksi oleh PT. Bogasari adalah para pengusaha kecil misalnya perajin kue dan roti. Ujung tombak pemasaran produk-produk dari

perusahaan besar yang memproduksi aneka kebutuhan sehari-hari lainnya adalah warung-warung kecil yang ada di tengah-tengah perumahan rakyat.

Ketiga, stabilitas sosial politik menjadi bagian terpenting dari risiko investasi. Semakin stabil, semakin rendah risiko. Pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha merupakan salah satu pilar yang bisa menjamin terjadinya stabilitas sosial. Karena itu adalah kepentingan investor besar untuk bisa melihat tumbuh kembangnya usaha rakyat.

Keempat, kebijakan liberalisasi akan berdampak menciptakan kemiskinan dan ketergantungan yang akut. Pengalaman di Meksiko menunjukkan bahwa setahun setelah diberlakukannya NAFTA (*North American Free Trade Area*/Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara), sebanyak lebih dari 20 ribu usaha kecil menengah (UKM) di negara tersebut gulung tikar karena dampak liberalisasi. Akibat menyempitnya lapangan pekerjaan, upah menurun sampai 40 persen. Pada akhirnya negara harus menyediakan santunan sosial berupa *cash transfer* yang di Indonesia populer dengan bantuan langsung tunai (BLT). Karena keuangan negara semakin terbatas, maka pemerintah harus lebih banyak menggantungkan diri pada utang luar negeri. Ada saatnya nanti di mana kenaikan pajak menjadi tidak terhindarkan untuk menyelamatkan keuangan negara dari kebangkrutan. Akhirnya para pemodal harus ikut memikul beban, sehingga negara, rakyat, dan dunia usaha menjadi semakin lemah.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, instrumen apa yang digunakan untuk mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengutip pendapat dari Didin Hafidhuddin bahwa sebuah konsep ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat emosional semata, melainkan harus didukung oleh landasan filosofis dan instrumen yang jelas. Jika landasan tersebut diambil dari ajaran Islam, tentu diharapkan akan berjalan dengan lebih baik dan lebih tepat. Secara filosofis, ekonomi kerakyatan sesungguhnya memiliki semangat yang sama dengan ekonomi syariah, yaitu keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak.²³

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan ditolong dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab (menolong) kaum dhuafa di antara kalian". Hadis ini mengisyaratkan bahwa rezeki dan pertolongan Allah akan datang manakala pemerintah melakukan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat kecil. Ada korelasi yang sangat kuat antara kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan pembelaan hak-hak rakyat miskin.²⁴

Didin juga menyatakan bahwa jika semangat ekonomi kerakyatan ini direalisasikan dengan menggunakan instrumen konvensional, keadilan dan kesejahteraan rakyat akan sangat sulit untuk diwujudkan. Contohnya adalah *Grameen Bank* di Bangladesh. *Grameen Bank* adalah contoh bank yang menekankan pada pemberian kredit mikro bagi masyarakat sehingga membuka kesempatan pada kelompok miskin untuk mengakses sumber

permodalan. Lahirnya *Grameen Bank* adalah sesuatu yang sangat positif dan inovatif, namun karena instrumen yang digunakan adalah berbasis bunga, maka upaya untuk mewujudkan kesejahteraan nasabah tidak berjalan mulus. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam pun sangat tinggi mencapai 54 persen. Belum lagi jika *hidden cost*-nya juga dihitung – seperti biaya keanggotaan, dokumentasi, kewajiban provisi atas dana yang diblok, dan sebagainya – seorang nasabah harus mengembalikan dana pinjaman plus bunga yang mencapai angka 86 persen. Akibatnya banyak nasabah yang kemudian menjual asetnya untuk melunasi utang mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa semangat pro rakyat saja tidak cukup. Tapi harus diimbangi dengan penggunaan instrumen yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, sebaiknya perkembangan pemikiran ekonomi kerakyatan yang sekarang berkembang sebaiknya bersumber pada ajaran Ilahiyah.²⁵

Perkembangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Bagaimana dengan kebijakan ekonomi di Indonesia yang selama ini telah dijalankan? Setelah memperoleh kemerdekaan dan menjalani masa transisi, di bawah kepemimpinan Soekarno kebijakan ekonomi dijalankan adalah *guided economics* atau ekonomi terpimpin. Pada masanya, Soekarno lebih berkiblat pada negara-negara yang berfaham sosialis. Semua aktivitas ekonomi di bawah kendali pemerintah. Pada masa itu ketidakstabilan kehidupan politik ikut berpengaruh terhadap struktur ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh sering berubah seiring dengan perubahan kabinet yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,9 persen pada periode 1952 sampai 1958 menjadi turun hanya sebesar 1,9 persen di periode 1960-1965.²⁶

Dari sisi fiskal, masalah defisit anggaran yang selalu bertambah dari tahun ke tahun hanya diatasi dengan cara mencetak uang baru. Kebijakan pencetakan uang baru ini justru memicu inflasi tinggi yang puncaknya terjadi di tahun 1966 yang mencapai 650 persen.²⁷

Melalui Undang-Undang No. 78/1958 Tentang Investasi Asing, pemerintahan orde lama melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan nasionalisasi ini justru membuat Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditutup, karena perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEJ ini mayoritas perusahaan-perusahaan asing.²⁸

Sedangkan bila dikaji dari segi aspek moneter, kebijakan ekonomi terpimpin mengeluarkan perintah untuk melakukan penggabungan bank milik pemerintah, termasuk Bank Indonesia, ke dalam satu wadah tunggal yang disebut 'Bank Berjuang'. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan langsung aktivitas perbankan di tangan pemerintah supaya dapat memperoleh dana segar bagi proyek-proyek pemerintah dengan cara mencetak uang.²⁹

Memasuki masa pemerintahan orde baru sejak 1966, kebijakan ekonomi yang diambil diarahkan untuk memecahkan persoalan warisan orde lama yang meliputi: (1). Utang luar negeri yang mencapai lebih dari US\$2 miliar; (2). Penerimaan ekspor yang hanya setengah dari pengeluaran impor; (3). Pengelolaan APBN yang buruk; (4). Laju inflasi yang mencapai 30-50 persen per bulan; (5). Buruknya infrastuktur perekonomian serta penurunan kapasitas produksi sektor industri dan ekspor.³⁰

Untuk mengatasi kelima persoalan ekonomi tersebut, tim ekonomi orde baru yang dipimpin oleh ekonom Widjoyo Nitisastro mengeluarkan program ekonomi yang dikenal dengan 'Trilogi Pembangunan', mencakup stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini, disusunlah program ekonomi konkrit yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kinerja perekonomian di bawah kepemimpinan Soeharto menunjukkan hasil yang membanggakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun.³¹

Arah yang ingin dicapai dari trilogi pembangunan merupakan perpaduan antara ekonomi kerakyatan yang tetap berorientasi pada pasar. Dalam rangka mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, Soeharto mengeluarkan kebijakan *trickle down effect*. Kebijakan ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan konglomerasi dan investor asing untuk memperkuat perekonomian nasional. Tetapi juga pada saat yang sama, ribuan koperasi berdiri dengan tegak, sektor pertanian dan perkebunan tampak subur karena bank sentral diperintahkan menyalurkan kredit secara langsung. Bahkan Bank Indonesia dapat mengintervensi pasar pada saat perbankan tidak mau menurunkan bunga kreditnya. Pemerintah ikut aktif menentukan arah ekonomi agar tidak dapat dikuasai oleh kelompok tertentu. Sedangkan modal asing diperlukan hanya untuk membantu mengatasi kesulitan di dalam negeri.³²

Kebijakan tersebut tidak terlepas dari konstitusi, yaitu penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan kemakmuran rakyat diutamakan, bukan kemakmuran sekelompok orang. Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, swasta tidak diperkenankan menguasai produksi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya Soeharto termasuk orang yang menyetujui berdirinya BUMN yang tidak mudah menjual asetnya ke pihak asing.³³

Namun kebijakan *trickle down effect* tidak berjalan dengan sukses. Kesejahteraan ekonomi yang diperoleh para konglomerat, yang semula diharapkan menjangar kepada para pelaku ekonomi kecil justru tidak terjadi. Kenyataan yang terjadi adalah keuntungan yang diperoleh para konglomerat dari hasil mengelola sumber daya ekonomi nasional dilarikan ke luar negeri dalam bentuk perluasan investasi. Oleh karena itu tidak heran apabila pada masa orde baru kesenjangan ekonomi semakin melebar.

Di tahun 1997 Indonesia terkena krisis moneter dan meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis tersebut. Mengutip pendapat Sunarsip, keterlibatan IMF di Indonesia dinilai gagal total. Penyebabnya, Konsensus Washington yang diberlakukan Amerika Latin diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Perbedaan krisis Indonesia di tahun 1997 dan krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin bukan bersumber dari sisi fiskal, tetapi moneter. IMF justru melihat akar persoalan dari sisi fiskal, sehingga fiskal harus ditekankan. IMF seolah menuduh pemerintah Indonesia tidak tepat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal Indonesia telah menerapkan APBN yang konservatif. Kesalahan diagnosis inilah yang akhirnya memperparah kondisi ekonomi Indonesia.

Ketidakadilan juga tercipta karena di saat APBN digunakan untuk kepentingan rekapitalisasi perusahaan besar, pemerintah justru mencabut subsidi BBM bagi rakyat kecil. Karena APBN membutuhkan pembiayaan besar, pemerintah pun harus menjual BUMN untuk menutupi defisit APBN. Maka, terjadilah serangkaian penjualan aset BUMN seperti Semen Gresik (tahun 1998) dan bank-bank yang dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) seperti Bank Central Asia (BCA), Lippo Bank, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Danamon (2002-2004), dan Indosat (2002).³⁴

Sesungguhnya masih ada cara lain untuk mengatasi defisit APBN, misalnya melakukan penghematan belanja negara, reformasi dan efisiensi perpajakan, mengatasi kebocoran pajak, renegosiasi dan *hair cut* utang luar negeri, sekuritisasi sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi, pengembangan pembayar pajak, redistribusi aset kepada rakyat miskin, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, menghilangkan subsidi bunga rekapitalisasi perbankan, dan lain-lain.³⁵ Namun upaya-upaya penghematan tersebut tidak dilakukan, seperti misalnya menunda perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri. Upaya penyehatan dan pengembangan sektor riil juga sama sekali tidak disentuh, padahal pajak bersumber dari Bergeraknya sektor riil. Yang dilakukan justru hanya yang mudah-mudah saja yaitu menjual aset negara.

Penerapan doktrin-doktrin neolib yang masih berjalan hingga saat ini adalah globalisasi berupa perdagangan bebas, lalu lintas modal yang bebas dan kebebasan investasi, walaupun bertentangan dengan kondisi dan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia membuka selebar-lebarnya pasar dan investor asing. Padahal perusahaan-perusahaan asing terutama yang datang dari AS, seperti *Exxon Mobile* dan *Freeport*, sudah ditolak oleh negara-negara Amerika Latin, karena perusahaan-perusahaan itu telah merusak lingkungan hidup sekitarnya. Keberadaan perusahaan asing tersebut juga tidak banyak memberi manfaat dan kesejahteraan pada masyarakat lokal.³⁶

Dampak globalisasi lainnya dialami oleh para petani tebu dan beras. Saat musim panen, kedua petani tersebut tidak mampu menjual produksinya

disebabkan kalah bersaing dengan produk impor. Namun sebaliknya, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan impor dengan alasan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini tentu saja akan menguntungkan orang kaya dan *broker* importir beras dan gula. Padahal negara kaya seperti Belanda, AS, Jerman, Jepang melakukan proteksi terhadap industri pertanian mereka sendiri.

Contoh lain adalah keberadaan pasar modern *Carrefour*. Hipermarket ini dengan mudah bisa ditemui di semua pusat kota. Mereka bebas bersaing dengan pedagang tradisional. Padahal di negara asalnya Prancis, *Carrefour* dilarang berdiri di tengah kota melainkan di pinggir kota.

Kepentingan nasional yang bersifat strategis dan jangka panjang telah dikesampingkan. Misalnya pemberantasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat. Bila kebijakan ini diterapkan, maka akan memperkuat daya serap pasar domestik dan meningkatkan kemampuan rakyat membayar pajak. Hal ini sesuai dengan anjuran Michael P. Todaro untuk segera melakukan redistribusi aset kepada kalangan miskin dan *straight forward* dalam pemberantasan kemiskinan.³⁷

Dalam implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menawarkan program ekonomi yang *pro growth* (memacu pertumbuhan ekonomi), *pro job* (memperluas lapangan kerja), dan *pro poor* (mengurangi kemiskinan). Namun persoalannya sekarang, apakah kebijakan *pro growth* dan *pro poor* ini dapat berjalan simultan atau tidak, karena fakta menunjukkan adanya kontradiksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 34,96 juta orang atau 15,42 persen dari total penduduk. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2000 hanya dinikmati oleh 40 persen golongan menengah dan 20 persen golongan terkaya.³⁸

Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi, APBN diharapkan akan mampu mewujudkan pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Peran anggaran akan semakin signifikan pada saat terjadi kelesuan ekonomi akibat daya beli masyarakat merosot. Kemampuan dan strategi pemerintah dalam mengelola anggaran sangat diharapkan sebagai pembuka jalan bagi pembalikan ekonomi (*turn around economy*). Yang lebih penting lagi adalah setiap implementasi kebijakan harus disertai dengan *strong political leadership* untuk berani mengambil keputusan dan mengambil risiko serta tanggung jawab atas keputusan tersebut. Misalnya, walaupun pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi, pemerintah pusat harus tegas mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah, jika perekonomian daerah ingin berjalan dengan baik. Karena kinerja ekonomi akan menunjukkan hasil yang baik bila pemerintah berhasil mendorong penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran pada pos belanja barang dan modal pada awal tahun anggaran akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tentu akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.³⁹

Sebagai paparan akhir, penulis coba menjawab pertanyaan di awal artikel ini mengenai sistem ekonomi apa yang saat ini diterapkan dalam perekonomian Indonesia.

Ditinjau berdasarkan kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak ada alasan lagi untuk menolak bahwa perekonomian Indonesia menganut sistem kapitalistik. Buktinya, saat ini terdapat undang-undang penanaman modal asing yang mengizinkan investor asing untuk menguasai sumber daya ekonomi selama 90 tahun. Dalam hal kepemilikan saham perusahaan swasta, investor asing diizinkan menguasai hampir 100 persen.

Walaupun undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun sampai saat ini kebijakan pemerintah tetap berpihak pada para pemilik modal. Sebaliknya bagi para pekerja, pemerintah belum memberikan keberpihakan dalam memenuhi hak-haknya. Contohnya, pemerintah tetap mengizinkan pengusaha menerapkan sistem kontrak kerja (*outsourcing*) bagi karyawannya.

Kemudian dalam pengaturan persaingan usaha, penulis berpendapat pemerintah telah berbuat maksimal mengatur hal tersebut dengan perangkat UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menjamin setiap pelaku usaha untuk bebas memasuki bidang usaha tertentu namun tetap dibatasi jangan sampai menguasai sebagian besar pangsa pasar.

Penutup

Sebagai bentuk baru dari liberalisme, neolib pada dasarnya tetap bertumpu pada mekanisme pasar. Intervensi negara hanya sebatas sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengaman bekerjanya mekanisme pasar.

Di Indonesia, kebijakan ekonomi yang dijalankan mengarah pada kebijakan neolib, bahkan sejak orde baru masih berkuasa. Saat orde baru, utang luar negeri dijadikan sebagai fondasi ideologi pembangunan. Pada masa orde reformasi, kebijakan ekonomi lebih liberal lagi dengan memberikan keleluasaan bagi investor asing menguasai sumber daya ekonomi Indonesia. Sebuah ideologi yang kontra dengan ideologi *founding father* Soekarno yang menekankan pentingnya kemandirian nasional.

Terlepas dari perdebatan yang ada, ekonomi kerakyatan merupakan sebuah mazhab ekonomi yang memberikan fokus dan pembelaan terhadap kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah. Pada tataran aplikasi, konsep ekonomi kerakyatan ini diterjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang pro *wong cilik*, seperti pemberian akses permodalan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) serta subsidi untuk petani dan nelayan miskin.

Pada akhirnya, untuk mengarah kepada kemandirian ekonomi nasional yang dicita-citakan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan sebuah

kebijakan ekonomi yang mampu menggerakkan semua pelaku ekonomi, baik besar maupun kecil, untuk memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya yang terkandung di dalam bumi Indonesia demi kemakmuran rakyat.

Catatan akhir:

- ¹ Muhammad Herry, *Neoliberalisme: Analisa Sejarah*, www.erasuslim.com.
- ² Soen'an Hadi Poernomo, "Pembangunan Multidimensi", *Republika* (18 Juni 2009), h. 4.
- ³ Muhammad Herry, *loc. cit.*
- ⁴ Ismatillah A. Nu'ad, "Ekonomi Neoliberal", *Republika* (18 Mei 2009), h. 4.
- ⁵ "Memahami Ekonomi Kerakyatan Soeharto", *Republika*, (6 Juni 2009), h. 12.
- ⁶ Pendapat dari Giersch (1961) sebagaimana dikutip oleh Revrison Baswir, *Neoliberalisme*, www.mail.yahoo.com.
- ⁷ Revrison Baswir, *loc. cit.*
- ⁸ *Ibid.*
- ⁹ Rizqullah, "Neoliberalisme dan Pendekatan Islam", *Majalah Sharing* (Edisi 30 Tahun III Juni 2009), h. 48-49.
- ¹⁰ Sunarsip, "Menggugat Neoliberalisme", *Republika* (8 Juni 2009), h. 1-11.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Mengutip pendapat Djiwandono, Lol merupakan dokumen yang menggambarkan langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh negara anggota dalam kaitannya dengan permintaannya untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari IMF. Lol disusun oleh negara anggota yang mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan atau memperoleh pinjaman dari IMF.
- ¹³ Muhammad Hery, *loc. cit.*
- ¹⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan George tahun 1999, sebagaimana dikutip oleh Aswar Aly, "Neo-Liberalisme di Indonesia", *Republika* (7 Februari 2003), h. 4.
- ¹⁵ *Ibid.*
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ Rizki A.Hakim, *Miskonsepsi Prabowonomics*, www.erasuslim.com.
- ²⁰ Arif Budimanta, "Kita Butuh Ekonomi Kerakyatan", *Republika* (13 Juli 2009), h. 6.
- ²¹ Rizki A Hakim, *loc. cit.*
- ²² Imam Sugema, "Ekonomi Kerakyatan", *Republika* (25 Mei 2009), h. 4.
- ²³ Didin Hafidhuddin, "Membela Ekonomi Rakyat", *Republika* (31 Mei 2009), h. 1-3.
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ *Ibid.*
- ²⁶ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 1-2.
- ²⁷ *Ibid.*
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ *Ibid.*, h. 3.
- ³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 5.

³² "Memahami Ekonomi Kerakyatan Soeharto", *loc. cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Sunarsip, *loc. cit.*

³⁵ Aswar Aly, *loc. cit.*

³⁶ Ismatillah A. Nu'ad, *loc. cit.*

³⁷ Aswari Aly, *loc. cit.*

³⁸ Didin Hafidhuddin, "Pilpres & Kemiskinan", *Republika* (18 Mei 2009), h. 4.

³⁹ Winantuningtyastiti S, "Agenda Setting Program Kerakyatan", *Republika* (4 Juni 2009), h. 4.

DAFTAR PUSTAKA

Aly, Aswar, "Neo-Liberalisme di Indonesia", *Republika* (7 Februari 2003).

Baswir, Revrison, "Neoliberalisme", www.mail.yahoo.com.

Budimanta, Arif, "Kita Butuh Ekonomi Kerakyatan", *Republika* (Jakarta), 13 Juli 2009.

Djiwandono, J. Soedradjad, "Letter of Intent: Binatang Apakah Itu?", www.pacific.net.id/pakar/sj/000814.html

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

Hafidhuddin, Didin, "Pilpres & Kemiskinan", *Republika* (8 Mei 2009).

_____, "Membela Ekonomi Rakyat", *Republika* (31 Mei 2009).

Hakim, Rizki A, "Miskonsepsi Prabowonomics", www.erasuslim.com.

Herry, Muhammad, "Neoliberalisme: Analisa Sejarah", www.erasuslim.com.

-
- “Memahami Ekonomi Kerakyatan Soeharto”, *Republika*, (6 Juni 2009).
- Nu’ad, Ismatillah A, “Ekonomi Neoliberal”, *Republika* (18 Mei 2009).
- Poernomo, Soen'an Hadi, “Pembangunan Multidimensi”, *Republika* (18 Juni 2009).
- Rizqullah, “Neoliberalisme dan Pendekatan Islam”, *Majalah Sharing* (Edisi 30 Tahun III Juni 2009).
- S, Winantuningtyastiti, “Agenda Setting Program Kerakyatan”, *Republika* (4 Juni 2009).
- Sugema, Imam, “Ekonomi Kerakyatan”, *Republika* (25 Mei 2009).
- Sunarsip, “Menggugat Neoliberalisme”, *Republika* (8 Juni 2009).